

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025
Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus**

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus
Triwulan II Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1 : Terwujudnya dukungan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing				
1.1	Indikator 1.1 Persentase Capaian Investasi KEK	persentase	90%	48,1%	53,4%
1.2	Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha	persentase	>10%	13%	13%
II	Sasaran Program 2 : Terwujudnya Layanan Biro Pengendalian KEK yang Berkualitas				
2.1	Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Pengendalian	skala	3,1 (skala 4)	3,1	3,1
III	Sasaran Program 3 : Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
3.1	Persentase Rekomendasi NSPK Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	persentase	90%	60%	66,6%
3.2	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK di Wilayah I	persentase	90%	73%	73%
3.3	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK di Wilayah II	persentase	90%	70%	70%
IV	Sasaran Program 4 : Terwujudnya Tata Kelola Biro Pengendalian KEK yang Baik				
4.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian KEK	persentase	90	100%	120%

Kinerja Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program : Terwujudnya dukungan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Program 1 : Terwujudnya Dukungan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Capaian Investasi Kawasan Ekonomi Khusus
2. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase

Capaian Investasi Kawasan Ekonomi Khusus

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing serta kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, serta dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK.

Dalam rangka mendukung RPJMN 2025 – 2029, maka KEK dapat berkontribusi terhadap nilai investasi nasional. Nilai investasi di KEK berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan tersebut di tingkat domestik maupun internasional. Nilai investasi adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nilai investasi KEK adalah jumlah total investasi yang masuk ke dalam kawasan tersebut, yang ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya dalam kawasan tersebut. Oleh karena itu, dalam mencapai terwujudnya pembangunan KEK yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK baik dari saat pengusulan dan pembentukan hingga pembangunan dan pengelolaan KEK untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp81,5 triliun, mencakup nilai penanaman modal yang dilakukan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) serta Pelaku Usaha (PU) di dalam kawasan. Perhitungan realisasi investasi dilakukan terhadap 25 KEK yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan II Tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp40,4 Triliun atau setara dengan 48,13% dari target tahunan. Angka ini mencerminkan progres awal yang positif terhadap pencapaian target investasi tahun berjalan. Ringkasan capaian kinerja investasi pada Triwulan II Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi TW II	% Kinerja TW II
Persentase Capaian Investasi KEK	%	100%	48,1 %	53,4 %

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase realisasi investasi di seluruh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap target tahunan yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Tahun 2024. Capaian indikator mencerminkan tingkat efektivitas fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan oleh Biro Pengendalian KEK dalam mendukung pelaksanaan investasi oleh Badan Usaha maupun Pelaku Usaha di dalam kawasan. Pengukuran dilakukan untuk menilai sejauh mana realisasi investasi mendekati target tahunan pada periode berjalan. Perhitungan capaian dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian Investasi KEK} = \frac{\Sigma \text{Realisasi Investasi}}{\Sigma \text{Target Investasi}} \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada saat laporan ini disusun, beberapa BUPP KEK belum menyampaikan data realisasi investasi secara lengkap. Angka yang tercantum bersifat sementara dan dapat diperbarui setelah seluruh laporan diterima dan diverifikasi. Capaian investasi masing-masing wilayah KEK dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Kawasan Ekonomi Khusus	Target Investasi 2025 (Miliar Rupiah)	Realisasi Triwulan II 2025 (Miliar Rupiah)
1	KEK Tanjung Lesung	339,69	88,80
2	KEK Sei Mangkei	6.037,00	4.119,28
3	KEK Palu	3.675,00	28,84
4	KEK Bitung	880	1.012,35
5	KEK Morotai	127	1,50
6	KEK Mandalika	537,41	14,66
7	KEK MBTK	78	0,00
8	KEK Tanjung Kelayang	38,5	47,08
9	KEK Sorong	25,7	0,00
10	KEK Arun Lhokseumawe	800,15	138,14
11	KEK Galang Batang	13.800,00	7.046,2
12	KEK Singhasari	500	350,90
13	KEK Likupang	158,73	4,55
14	KEK Kendal	8.360,00	5.120,08
15	KEK Nongsa	2.835,00	2.700,26
16	KEK Lido	1.057,54	482,72

17	KEK Gresik	24.406,49	11.203,71
18	KEK BAT	700	86,60
19	KEK Sanur	1.730,00	773,72
20	KEK KKB	1.796,18	260,98
21	KEK Tanjung Sauh	2.046,23	4.878,60
22	KEK Setangga	10.619,15	1.744,49
23	KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten	142,15	16,68
24	KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam	817,00	5,08
25	KEK Industropolis Batang	2.600,00	356,33
	TOTAL	81.506,92	40.481,55

Secara umum, realisasi investasi telah menunjukkan tren positif, meskipun pencapaiannya masih bervariasi di tiap kawasan. Beberapa KEK berhasil mencatat capaian yang signifikan dan menjadi kontributor utama, seperti KEK Gresik sebesar Rp11,2 triliun, KEK Galang Batang sebesar Rp7 triliun, KEK Kendal sebesar Rp5,1 triliun, KEK Tanjung Sauh sebesar Rp4,8 triliun, KEK Sei Mangkei sebesar Rp4,1 triliun, dan KEK Nongsa sebesar Rp2,7 triliun.

Capaian ini menunjukkan bahwa sejumlah kawasan mampu bergerak lebih cepat dalam menarik investasi dan memperkuat aktivitas ekonomi. Namun, terdapat pula beberapa KEK yang realisasinya masih relatif rendah dibandingkan target tahunan, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam hal fasilitasi, monitoring, serta percepatan *debottlenecking*.

Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Persentase Capaian Investasi Kawasan Ekonomi Khusus			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator	Terlaksana	<p>Pertemuan koordinatif dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK telah digelar guna membahas perkembangan investasi serta memperkuat sinergi antar pihak terkait. Pada Triwulan II 2025 telah terlaksana beberapa kali rapat koordinasi, berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 April 2025, Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Pengelolaan KEK Belum Optimal • 7 Mei 2025, Rapat Koordinasi Administrator KEK terkait Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK

			<ul style="list-style-type: none"> • 16 Mei 2025, Koordinasi Administrator KEK terkait Pengendalian, Pembangunan, dan Pengelolaan KEK • 19 Mei 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK Sorong • 19 Mei 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK Morotai • 19 Mei 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK MBTK • 19 Mei 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan Palu • 21 Mei 2025, Pertemuan Pembahasan Rencana Persiapan Pertemuan Perguruan Tinggi Inggris • 25 Juni 2025, Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan KEK Pariwisata Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025
2	Pengumpulan dan Analisis Data Investasi	Terlaksana	Berdasarkan Nota Dinas Nomor PR.00/43/SJ.DNKEK.1/05/2025 terkait hal Penyampaian Laporan Narasi Kinerja Triwulan II T.A. 2025, telah diperoleh dan dimanfaatkan data laporan BUPP untuk memantau progres investasi masing-masing wilayah KEK pada Triwulan II 2025.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Biro Pengendalian KEK telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional serta rapat koordinasi dengan Administrator KEK untuk membahas evaluasi kinerja, pengendalian pembangunan, dan pengelolaan kawasan. Laporan kinerja dari BUPP telah diterima dan dianalisis guna mendukung pemantauan investasi secara lebih akurat. Selain pelaksanaan rencana aksi tersebut, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap ketercapaian target kinerja masing-masing KEK;
- b) Peningkatan pelayanan perizinan berusaha, non perizinan, dan perizinan lainnya pada setiap Pelaku Usaha di masing-masing KEK;
- c) Penguatan regulasi dan peningkatan implementasi fasilitas dan kemudahan di KEK;

Hasil pelaksanaan tersebut mencerminkan komitmen Biro Pengendalian terhadap pencapaian target kinerja dan penguatan tata kelola KEK. Komitmen ini tercermin dari realisasi investasi di beberapa kawasan yang menunjukkan performa positif pada Triwulan II Tahun 2025, antara lain KEK Gresik (Rp11,2 Triliun), KEK Galang Batang (Rp7 Triliun), dan KEK Kendal (Rp5,1 Triliun). Capaian ini menunjukkan efektivitas pemantauan serta sinergi antarpihak dalam mendorong percepatan investasi di kawasan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan II Tahun 2025, data investasi yang dihimpun dari BUPP masih memerlukan proses validasi dan konfirmasi lebih lanjut. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi serta pencatatan capaian kinerja secara menyeluruh. Sebagai langkah tindak lanjut, akan diselenggarakan Rapat Kerja Nasional pada akhir Semester I Tahun 2025 yang difokuskan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, sekaligus memperkuat koordinasi serta pelaporan dari seluruh KEK. Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antar pemangku kepentingan dapat ditingkatkan sehingga pencapaian target kinerja dapat lebih optimal pada periode berikutnya.

1.2. Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha

Latar Belakang

Dalam upaya mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tidak hanya ditujukan sebagai pusat investasi, tetapi juga sebagai motor penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan pelaku usaha. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan pelaku usaha merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas pengelolaan KEK serta kontribusinya terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025–2029.

Indikator ini mengukur pertumbuhan tenaga kerja dan pelaku usaha secara kumulatif di seluruh KEK, baik dari sektor industri, pariwisata, jasa, maupun sektor strategis lainnya. Data dihimpun dari laporan Triwulanan Badan Usaha Pengelola (BUPP), yang dikonsolidasikan oleh Biro Pengendalian KEK.

Pada Triwulan II Tahun 2025, telah terjadi penambahan tenaga kerja sebesar 28.094 orang dan peningkatan jumlah pelaku usaha sebanyak 43 pelaku usaha yang tersebar di beberapa KEK, terutama di sektor hilirisasi industri, pariwisata, dan jasa kesehatan. Berdasarkan data 2025 persentase pertumbuhan kumulatif pada Triwulan II adalah sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja				
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II
Persentase Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha KEK	%	>10 %	13%	13%

Biro Pengendalian KEK memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian terhadap perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha. Pemantauan atas indikator ini penting untuk menilai sejauh mana aktivitas ekonomi di dalam kawasan mampu menciptakan lapangan kerja dan menarik partisipasi dunia usaha. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut sejalan dengan target pembangunan

KEK yang berkelanjutan dan inklusif. Capaian ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Pertumbuhan Tenaga Kerja dan Pelaku Usaha KEK} \\ &= \frac{(\Sigma \text{ Kumulatif Tenaga Kerja } t1 - \Sigma \text{ Kumulatif Tenaga Kerja } t0)}{\Sigma \text{ Kumulatif Tenaga Kerja } t0} \times 50\% \\ &+ \frac{(\Sigma \text{ Kumulatif Pelaku Usaha } t1 - \Sigma \text{ Kumulatif Pelaku Usaha } t0)}{\Sigma \text{ Kumulatif Pelaku Usaha } t0} \times 50\% \end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan pertumbuhan tenaga kerja dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan menggunakan formula gabungan yang mempertimbangkan dua komponen utama, yaitu pertumbuhan serapan tenaga kerja dan pertumbuhan pelaku usaha. Masing-masing komponen diberi bobot sebesar 50%, sehingga menghasilkan nilai pertumbuhan yang seimbang antara aspek ketenagakerjaan dan dinamika usaha di kawasan.

Berdasarkan data yang terkonsolidasi dari laporan BUPP, hasil perhitungan kumulatif hingga Triwulan II Tahun 2025, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja kumulatif s.d. 2024 meningkat dari 160.989 orang menjadi 187.376 orang (s.d. Triwulan II 2025). Sementara itu, jumlah pelaku usaha naik dari 403 pelaku usaha menjadi 442 pelaku usaha.

Dengan demikian, total pertumbuhan kumulatif tenaga kerja dan pelaku usaha KEK Triwulan II Tahun 2025 mencapai 13%. Capaian ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, terutama pada kawasan-kawasan yang telah aktif beroperasi dan melaporkan perkembangan secara lengkap. Meski menunjukkan tren positif, percepatan pada triwulan berikutnya tetap diperlukan agar target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa kegiatan pengendalian dan fasilitasi yang dilakukan Biro Pengendalian KEK bersama Administrator KEK telah memberikan dampak positif terhadap perluasan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di KEK. Upaya tersebut diharapkan terus ditingkatkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sepanjang tahun.

Angka yang tercantum bersifat sementara dan dapat diperbarui setelah seluruh laporan diterima dan diverifikasi. Capaian perhitungan kumulatif hingga Triwulan II Tahun 2025 untuk serapan tenaga kerja dan pelaku usaha di KEK dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kawasan Ekonomi Khusus	Tenaga Kerja		Pelaku Usaha	
		Penyerapan TK Akumulatif S.D 2024	Penyerapan TK Akumulatif S.D 2025	Jumlah PU Akumulatif S.D 2024	Jumlah PU Akumulatif S.D 2025
1	KEK Tanjung Lesung	5.961	9.758	27	28
2	KEK Sei Mangkei	5.612	7.132	25	26
3	KEK Palu	643	643	45	21
4	KEK Bitung	1.097	1.158	14	14
5	KEK Morotai	402	457	7	7
6	KEK Mandalika	17.455	19.010	14	28
7	KEK MBTK	226	276	1	1
8	KEK Tanjung Kelayang	719	743	7	7
9	KEK Sorong	124	124	10	10
10	KEK Arun Lhokseumawe	1.806	1.832	6	6
11	KEK Galang Batang	5.185	5.519	22	22
12	KEK Singhasari	856	895	23	27
13	KEK Likupang	1.010	1.045	8	9
14	KEK Kendal	61.984	66.614	112	128
15	KEK Nongsa	4.982	6.925	18	17
16	KEK Lido	4.879	5.474	9	10
17	KEK Gresik	39.656	41.022	30	32
18	KEK BAT	2.269	2.454	1	1
19	KEK Sanur	3.826	4.031	11	13
20	KEK KKB	1.383	2.796	2	3
21	KEK Tanjung Sauh	240	817	1	5
22	KEK Setangga	796	2.228	9	9
23	KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten	-	316	0	4
24	KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam	5	5	0	1
25	KEK Industropolis Batang	-	6.102	0	13
	TOTAL	161.116	187.376	402	442

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator	Terlaksana	<p>Pertemuan koordinatif dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK telah digelar guna membahas perkembangan investasi serta memperkuat sinergi antar pihak terkait. Pada Triwulan II 2025 telah terlaksana beberapa kali rapat koordinasi, berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 April 2025, Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Pengelolaan KEK Belum Optimal • 7 Mei 2025, Rapat Koordinasi Administrator KEK terkait Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK • 16 Mei 2025, Koordinasi Administrator KEK terkait Pengendalian, Pembangunan, dan Pengelolaan KEK • 19 Mei 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK Sorong • 19 Mei 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK Morotai • 19 Mei 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan KEK MBTK • 19 Mei 2025, Rapat Koordinasi Perkembangan Palu • 21 Mei 2025, Pertemuan Pembahasan Rencana Persiapan Pertemuan Perguruan Tinggi Inggris • 25 Juni 2025, Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan KEK Pariwisata Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025
2	Pengumpulan dan Analisis Data Pelaku Usaha	Terlaksana	<p>Berdasarkan Nota Dinas Nomor PR.00/43/SJ.DNKEK.1/05/2025 terkait hal Penyampaian Laporan Narasi Kinerja Triwulan II T.A. 2025, telah diperoleh dan dimanfaatkan data laporan BUPP untuk memantau progres serapan tenaga kerja dan pelaku usaha di berbagai KEK pada Triwulan II 2025.</p>

Capaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan rencana aksi yang telah dijalankan, seperti penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dan rapat koordinatif antara BUPP, pelaku usaha, dan Administrator KEK sebagai forum evaluasi dan sinergi kebijakan. Selain itu, pengumpulan dan analisis data dari laporan BUPP turut mendukung pemantauan terhadap pertumbuhan serapan tenaga kerja dan pelaku usaha di setiap kawasan KEK secara lebih akurat. Pelaksanaan ini mencerminkan komitmen terhadap penguatan tata kelola serta pencapaian target pembangunan kawasan sepanjang tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan II Tahun 2025, data investasi yang dihimpun dari BUPP masih memerlukan proses validasi dan konfirmasi lebih lanjut. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi serta pencatatan capaian kinerja secara menyeluruh. Sebagai langkah tindak lanjut, akan diselenggarakan Rapat Kerja Nasional pada akhir Semester I Tahun 2025 yang difokuskan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program, sekaligus memperkuat koordinasi serta pelaporan dari seluruh KEK. Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antar pemangku kepentingan dapat ditingkatkan sehingga pencapaian target kinerja dapat lebih optimal pada periode berikutnya.

2

Sasaran Program : Terwujudnya Layanan Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2 : Terwujudnya Layanan Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Biro Pengendalian. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Pengendalian Latar Belakang

Sebagai unit pelayanan publik yang menangani pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Biro Pengendalian dituntut untuk memberikan layanan yang responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kepuasan terhadap layanan yang diberikan menjadi ukuran utama dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi biro dari perspektif pengguna layanan (*customer*).

Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus memiliki peran strategis dalam memastikan keberlangsungan dan efektivitas pengelolaan KEK secara nasional. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Biro Pengendalian KEK tidak hanya berperan sebagai entitas regulator dan evaluator internal, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Pengelola (BUPP), Administrator KEK, Dewan Kawasan, serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Oleh karena itu, tingkat kepuasan para pengguna layanan terhadap kinerja Biro menjadi bagian integral dalam pengukuran keberhasilan institusi dari perspektif customer. Layanan yang dimaksud mencakup fasilitasi koordinasi kebijakan, konsultasi teknis, penanganan masalah, pemberian rekomendasi, hingga pelayanan informasi dan asistensi administratif lainnya. Indeks Kepuasan Layanan digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur kualitas layanan publik yang diberikan, berdasarkan persepsi dan pengalaman pengguna terhadap berbagai aspek pelayanan seperti kejelasan prosedur, kecepatan pelayanan, kompetensi pelaksana, serta kemudahan akses informasi. Pada Triwulan II Tahun 2025, Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas dan Kemudahan KEK telah terealisasi dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II
Indeks Kepuasan Layanan Biro Pengendalian	indeks	3.1 (skala 4)	3.1	3.1

Penilaian ini menjadi dasar penting dalam perbaikan berkelanjutan sistem layanan publik Biro Pengendalian KEK agar lebih responsif, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan stakeholders di lingkungan KEK. Indeks Kepuasan Layanan dihitung berdasarkan hasil survei yang diberikan kepada BUPP dan/atau Pelaku Usaha, dengan mempertimbangkan beberapa aspek layanan utama. Nilai akhir diperoleh melalui rumus berikut:

$$\text{Indeks kepuasan} = \text{Nilai Unsur Survei Kepuasan Masyarakat} \times \text{Bobot}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi diarahkan pada pelaksanaan survei dan evaluasi terhadap kualitas layanan biro, termasuk aspek koordinasi dan fasilitasi kebijakan. Pelaksanaan survei dan analisis awal telah memberikan gambaran kebutuhan perbaikan layanan.

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Survei pelayanan pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK	Terlaksana	Pada periode Triwulan II 2025, telah dibagikan survei kepuasan layanan yang ditujukan kepada Badan Usaha Pengelola (BUPP) dan Pelaku Usaha (PU). Dari total 25 responden, hasil survei menunjukkan bahwa secara umum layanan yang diberikan dinilai baik, dengan nilai indeks kepuasan sebesar 3,1.
2	Survei pelaksanaan koordinasi antar K/L	Terlaksana	Selama periode ini dilakukan pembahasan internal terkait koordinasi layanan Biro Pengendalian dengan K/L terkait.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Biro Pengendalian KEK telah melaksanakan survei kepuasan layanan yang ditujukan kepada Badan Usaha Pengelola (BUPP) dan Pelaku Usaha (PU). Survei ini merupakan bagian dari pengembangan Indeks Kepuasan Layanan, yang bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan biro sekaligus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

Instrumen survei mencakup penilaian terhadap layanan fasilitasi debottlenecking atas isu yang dihadapi oleh BUPP atau pelaku usaha, serta pelayanan dalam penyusunan pedoman pembangunan dan pengelolaan KEK. Dari total 25 responden, hasil survei menunjukkan bahwa secara umum layanan yang diberikan dinilai baik, dengan nilai indeks kepuasan sebesar 3,1. Sebagian besar responden menilai bahwa petugas biro memberikan layanan secara ramah, sopan, dan kompeten, serta mampu menjelaskan prosedur dengan jelas. Akses informasi terkait jenis layanan, persyaratan, dan mekanisme pengaduan juga dinilai mudah diakses dan tepat waktu.

Meskipun secara umum memuaskan, terdapat beberapa masukan terkait aspek teknis, khususnya pada kecepatan penanganan administratif dan kejelasan jadwal tindak lanjut. Pengguna berharap adanya perbaikan pada aspek keandalan pengiriman dokumen elektronik serta penguatan sarana pendukung lainnya, agar konsistensi dan kualitas layanan tetap terjaga. Sebagai tindak lanjut, Biro juga telah melakukan diskusi internal terkait rencana pengembangan survei lanjutan yang akan ditujukan kepada Kementerian/Lembaga terkait. Survei ini dirancang untuk mengukur efektivitas koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengelolaan KEK, dan akan menjadi dasar penyusunan indikator serta pelaksanaan survei yang lebih menyeluruh pada periode selanjutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Beberapa masukan muncul terkait kecepatan penanganan proses administratif dan koordinasi internal, meski umumnya memuaskan, ada keinginan agar penjadwalan dan tindak lanjut permohonan semakin diperjelas sehingga pengguna dapat merencanakan waktu mereka dengan lebih cermat. Untuk mempertahankan kekuatan pada aspek keramahan, kejelasan informasi, dan kompetensi petugas, serta memperbaiki area yang masih perlu ditingkatkan, Biro Pengendalian KEK perlu untuk terus melakukan penyempurnaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima.

3

Sasaran Program : Terlaksananya Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 3 : Terwujudnya Layanan Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Rekomendasi NSPK Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK
2. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK di Wilayah I
3. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK di Wilayah II

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase Rekomendasi NSPK Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK

Latar Belakang

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) membutuhkan keseragaman standar dan acuan normatif agar implementasinya berjalan efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, diperlukan penerapan standar pengelolaan dan pengendalian yang sistematis dan menyeluruh di setiap tahapan siklus KEK, mulai dari pembangunan, pengoperasian, hingga pelaporan dan evaluasi.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK menjadi instrumen utama yang memberikan panduan teknis dan administratif kepada para pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Pengelola (BUPP), Pelaku Usaha (PU), Administrator KEK, Dewan Kawasan, dan Dewan Nasional KEK. NSPK ini menjadi

kerangka acuan nasional untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam KEK berjalan sesuai dengan rencana pembangunan, memperkuat efektivitas kelembagaan, serta memitigasi potensi dampak negatif dari kegiatan ekonomi di dalam kawasan

Melalui penyusunan dan pemberian rekomendasi terhadap NSPK, Biro Pengendalian KEK menjalankan peran strategisnya sebagai penjaga mutu dan pengarah teknis dalam sistem penyelenggaraan KEK. Adapun target kinerja pada tahun 2025 Triwulan II adalah sebesar 20%, dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Persentase Rekomendasi NSPK Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK	%	90%	60%	66,6%

Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus berperan dalam mendukung penyusunan dan pemantauan standar pembangunan serta pengelolaan KEK, termasuk memfasilitasi penyelesaian isu-isu strategis yang muncul selama proses pembangunan dan evaluasi kawasan. Untuk mendorong terciptanya KEK yang berkualitas dan memenuhi standar internasional, diperlukan pengembangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait infrastruktur dan wilayah sebagai pedoman pembangunan. Proses penyempurnaan NSPK ini bertujuan untuk menelaah standar yang telah ada serta menggali peluang pengembangan standar baru yang relevan dengan kebutuhan pengelolaan KEK ke depan.

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian kinerja telah mencapai 60% dari target tahunan yang menunjukkan progres dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan NSPK. Nilai persentase ini diperoleh melalui perhitungan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ rekomendasi NSPK} = \frac{\sum \text{NSPK yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{NSPK yang direncanakan}} \times 100\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan serangkaian langkah atau kegiatan yang dirancang untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini secara khusus diarahkan untuk mendukung perbaikan prosedur monitoring dan evaluasi Kawasan Ekonomi Khusus, serta menangani isu-isu strategis dan hambatan yang menjadi kendala (*debottlenecking*) dalam pelaksanaannya. Berdasarkan rencana aksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Implementasi konsep tata kelola terkait pembangunan dan kesiapan beroperasi KEK	Terlaksana	<p>Sebagai upaya dalam mendukung konsep tata kelola terkait pembangunan dan kesiapan beroperasi di KEK, telah terlaksana sejumlah kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Kesiapan Beroperasi KEK serta Pedoman Penerbitan, Perubahan, dan Pencabutan Tanda Pengenal Khusus Badan Usaha dan/atau Pelaku di KEK yang termuat pada Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK No. 4 Tahun 2025. 2. Rapat Pembahasan Penyesuaian Pedoman telah diselenggarakan oleh Biro Pengendalian diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • 22 April 2025, Pembahasan Penyampaian Lembar Kerja Administrator • 23 Mei 2025, Pembahasan KBLI Kegiatan Utama • 28 Mei 2025, Pembahasan Estate Regulation dan Kesiapan Beroperasi KEK ETKI Banten • Telah dilakukan Rapat Koordinasi dan Tindak Lanjut Usulan Penyempurnaan KBLI 2020 Kategori F dan L • Telah dilakukan Pembahasan Finalisasi Penambahan KBLI Kegiatan Utama Gresik, Kendal, Batang
2	Implementasi konsep tata kelola terkait pengelolaan KEK	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disusun lembar kerja Petunjuk Teknis Pengawasan Administrator KEK melalui Rapat Pembahasan yang dilakukan oleh Biro Pengendalian bersama dengan Administrator KEK 2. Telah terlaksana Pembahasan Pedoman Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor pada 17 Juni 2025

Pada Triwulan II Tahun 2025, capaian kinerja indikator penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) telah mencapai 60% yang berarti 3 dari 5 rencana tahunan telah ditindaklanjuti. Penerapan prinsip tata kelola dalam aspek pembangunan dan kesiapan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menunjukkan progres yang positif, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Kesiapan Beroperasi KEK serta Pedoman Penerbitan, Perubahan, dan Pencabutan Tanda Pengenal Khusus bagi Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK. Pedoman ini menjadi acuan bagi Administrator, Badan Usaha, dan Pelaku Usaha dalam proses penerbitan dan pengelolaan Tanda Pengenal Khusus, sekaligus memperkuat standar operasional pengelolaan kawasan.

Capaian ini mencerminkan komitmen Biro Pengendalian KEK dalam memperkuat regulasi teknis yang mendukung konsistensi pengendalian dan pengawasan KEK di seluruh Indonesia. Sejumlah kegiatan koordinasi telah dilaksanakan dalam rangka

penyusunan laporan pengembangan standar pembangunan dan pengelolaan KEK. Proses penerapan konsep tata kelola juga dilakukan melalui kolaborasi antara Biro Pengendalian KEK dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lembaga National Single Window (LNSW), Administrator KEK, serta instansi terkait lainnya. Inisiatif ini ditujukan untuk memperkuat sistem manajemen dan meningkatkan kesiapan operasional kawasan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di KEK.

Sebagai bagian dari rencana aksi, saat ini sedang dalam tahap penyempurnaan lembar kerja Penyusunan Peraturan Perubahan Kegiatan Utama (KBLI) KEK, serta proses pembahasan penyusunan Peraturan Pedoman Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Ekspor. Pembahasan ini bertujuan menyusun pedoman teknis yang dapat mempermudah akses pelaku usaha terhadap fasilitas ekspor.

Pada Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi telah mempertimbangkan prinsip efisiensi, khususnya dalam penggunaan sumber daya anggaran. Untuk kegiatan penyusunan Rekomendasi NSPK terkait Pembangunan dan Pengelolaan KEK, dengan realisasi hingga akhir Triwulan II mencapai 31,58% dari total anggaran yang tersedia.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga dengan akhir Triwulan II, belum ditemukan kendala atau hambatan signifikan dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari kelancaran pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengendalian serta proses penyempurnaan NSPK pembangunan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus.

1.2. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK di Wilayah I

Latar Belakang

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan inisiatif strategis nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah. Agar tujuan KEK dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara menyeluruh dalam setiap tahap pembangunan dan pengelolaan kawasan. Dalam hal ini, fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis di wilayah KEK menjadi fungsi krusial dari Biro Pengendalian KEK sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Nasional KEK.

Wilayah I yang terdiri dari sejumlah KEK di pulau Sumatera & Kalimantan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing, seringkali menghadapi hambatan implementatif baik di level teknis maupun kebijakan. Permasalahan yang timbul bisa berupa keterlambatan pembangunan infrastruktur, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, belum optimalnya insentif fiskal, hingga persoalan administratif seperti perizinan dan pelaporan. Dalam kondisi ini, diperlukan peran aktif dan responsif dari Biro Pengendalian KEK untuk mengoordinasikan penyelesaian masalah secara lintas sektoral dan lintas pemerintahan.

Indikator ini mengukur sejauh mana Biro telah berhasil memfasilitasi penyelesaian permasalahan strategis di KEK Wilayah I dengan pendekatan yang mengedepankan koordinasi kebijakan, komunikasi antar institusi, dan penguatan mekanisme monitoring. Fasilitasi yang dimaksud tidak terbatas pada pengumpulan data atau

pencatatan masalah, tetapi mencakup tindak lanjut aktif berupa penyusunan rekomendasi, pelibatan K/L dan pemda, serta dorongan konkret untuk penyelesaian teknis maupun regulatif.

Tingkat capaian indikator ini mencerminkan efektivitas fungsi pengendalian Biro dalam mendorong sinergi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan KEK. Semakin tinggi tingkat fasilitasi yang berhasil diselesaikan, semakin menunjukkan bahwa KEK dikelola dengan dukungan kebijakan yang solid, sinkron, dan bebas dari hambatan sistemik yang dapat mengganggu keberlanjutan pengembangannya. Berikut hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II tahun 2025:

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II
Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus di Wilayah I	%	90 %	73%	73%

Sebagai langkah awal pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), telah diselenggarakan rapat kerja bersama Dewan Kawasan, BUPP, dan Administrator KEK guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai rencana kerja tahunan, target kinerja, serta berbagai isu strategis di KEK Wilayah I. KEK Wilayah I yang menjadi fokus pengendalian mencakup KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Nongsa, KEK Batam Aero Technic, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam, KEK Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) serta KEK Setangga. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui observasi langsung serta dokumentasi perkembangan dan pertumbuhan kawasan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan, telah dilakukan identifikasi terhadap berbagai hambatan (*debottlenecking*), yang meliputi tantangan infrastruktur maupun kendala dalam pelaksanaan fasilitas dan kemudahan. Untuk itu, audiensi dengan BUPP, pelaku usaha, dan instansi pemerintah terkait dilaksanakan sebagai upaya merumuskan solusi secara terpadu. Persentase penyelesaian ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan serta pengelolaan KEK, yang dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK} = & \\
 & \frac{(\Sigma \text{Permasalahan KEK yang ditindaklanjuti})}{\Sigma \text{Permasalahan KEK yang masuk}} \times 70\% + \\
 & \frac{\Sigma \text{Penyelesaian Permasalahan} \times \text{skor tahapan}}{\Sigma \text{Rekomendasi Permasalahan KEK untuk diselesaikan stakeholder KEK}} \times 30\%
 \end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya fasilitasi di Wilayah I telah difokuskan pada perencanaan pembangunan, pengelolaan dan penyelesaian isu-isu strategis. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar isu yang ada telah ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis. Berdasarkan hasil penghitungan indikator, tingkat capaian fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis di KEK Wilayah I tercatat sebesar 78%.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Rapat Kerja Penyusunan Target Investasi dan Tenaga Kerja KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Investasi Oracle di KEK Nongsa dan Pemantauan Rencana Aksi KEK PKIB Batam pada 10 April 2025.
2	Perencanaan pembangunan KEK Wilayah I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Administrator KEK terkait Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK pada tanggal 7 Mei 2025
3	Debottlenecking isu strategis KEK	Terlaksana	Sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk mendukung debottlenecking isu strategis KEK di Wilayah 1, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Pengelolaan KEK Belum Optimal 2. Pembahasan Pending Issue Fasilitas Fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 3. Tindak Lanjut Penyelesaian Isu Lingkungan Hidup di KEK 4. Audiensi dengan BUPP KEK Tanjung Sauh 5. Pembahasan Lartas KEK Galang Batang 6. Koordinasi Evaluasi Ekspor Pupuk Urea Semester I 7. Rapat Pembahasan Perkembangan dan Evaluasi KEK 8. Rapat Pembahasan Penerbitan Ekspor Terdaftar Batubara di KEK 9. Diskusi Pembahasan Pengusulan Penetapan Kawasan Pabean di KEK Setangga

Berbagai kegiatan telah diselenggarakan guna mendukung proses penyusunan dan peningkatan kesiapan operasional serta pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Wilayah I. Kegiatan tersebut mencakup rapat pembahasan potensi penambahan target melalui Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Investasi Oracle di KEK Nongsa dan Rapat Koordinasi dengan Administrator KEK terkait Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK.

Sebagai bagian dari upaya fasilitasi isu lingkungan, Biro Pengendalian KEK telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas isu lingkungan yang terjadi di beberapa KEK, salah satunya di KEK Arun Lhokseumawe. Kegiatan lainnya meliputi rapat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait sebagai dukungan terhadap penyelesaian isu-isu strategis dan percepatan operasional KEK. Langkah-langkah ini mendukung

terciptanya pengelolaan KEK yang lebih siap secara operasional, sekaligus memperkuat daya tarik investasi dan kontribusi kawasan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

Selain itu, telah dilaksanakan Pembahasan Pending Issue Fasilitas Fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Rapat Pembahasan Lertas KEK Galang Batang dalam rangka mendukung operasional kawasan tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi selama Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan pemanfaatan anggaran yang cukup signifikan pada tahap awal pelaksanaan. Kegiatan rekomendasi pengendalian pembangunan KEK di Wilayah I, telah terealisasi hingga akhir Triwulan II mencapai 47,58% dari total anggaran kegiatan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan II, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Wilayah I pada Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus berjalan dengan lancar.

1.3. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK di Wilayah II

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dirancang sebagai wilayah strategis yang dilengkapi dengan fasilitas dan kemudahan tertentu untuk meningkatkan investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Agar KEK dapat berkembang secara optimal, diperlukan proses pengembangan yang terstruktur, mulai dari tahap pengusulan, penetapan, pembangunan, hingga operasional. Pada tahap pembangunan dan pengelolaan, diperlukan ekosistem pendukung seperti infrastruktur kawasan, regulasi yang kondusif, pelayanan perizinan yang profesional, serta kapasitas kelembagaan yang andal.

Dalam konteks ini, Biro Pengendalian KEK Wilayah II berperan penting dalam memastikan bahwa proses pembangunan dan pengelolaan KEK di wilayah Jawa, Bali, Sulawesi, dan Papua berjalan sesuai arah kebijakan dan rencana strategis nasional. Fungsi pengendalian mencakup koordinasi lintas pemangku kepentingan, monitoring pelaksanaan kebijakan, fasilitasi penyelesaian isu, serta evaluasi capaian di lapangan. Pengendalian ini dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong keterpaduan kebijakan dan menekan potensi hambatan struktural yang dapat mengganggu kesiapan kawasan.

Sepanjang Triwulan II Tahun 2025, berbagai kegiatan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi telah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengendalian. Pelaksanaan ini juga bertujuan untuk memperkuat konsistensi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan teknis di daerah, serta mempercepat penanganan isu-isu yang berpotensi menghambat pengembangan kawasan. Tingkat capaian indikator ini mencerminkan efektivitas Biro dalam mengawal pembangunan KEK secara akuntabel, terarah, dan selaras dengan tujuan strategis nasional. Hasil pengukuran kinerja disajikan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II
Persentase Capaian Investasi KEK	%	90 %	70%	70%

Sebagai awal kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), telah diselenggarakan rapat kerja bersama antara BUPP dan Administrator KEK guna memperoleh informasi komprehensif terkait rencana kerja tahunan, target kinerja, serta isu dan tantangan strategis di masing-masing KEK Wilayah II. Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dilakukan observasi langsung di lapangan serta pendokumentasian perkembangan kawasan berdasarkan indikator pertumbuhan dan kemajuan pengelolaan. KEK yang termasuk dalam cakupan pengendalian di Wilayah II antara lain KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Singhasari, KEK Mandalika, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Likupang, KEK Sanur, KEK Morotai, dan KEK Sorong.

Hasil pengukuran kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat fasilitasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis di KEK Wilayah II mencapai 70%. Nilai ini mencerminkan adanya tindak lanjut terhadap sejumlah isu yang telah diidentifikasi dalam rapat kerja dan hasil observasi lapangan. KEK di Wilayah II umumnya berada pada tahapan pembangunan dan pengelolaan yang bervariasi, sehingga pengendalian tidak hanya difokuskan pada penyelesaian masalah teknis, tetapi juga pada dukungan kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan antar-instansi. Nilai capaian diperoleh dari penghitungan kegiatan monitoring, evaluasi, dan fasilitasi yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan formula berikut:

$$\% \text{ Fasilitasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK} = \frac{\sum \text{Permasalahan KEK yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Permasalahan KEK yang masuk}} \times 70\% + \frac{\sum \text{Penyelesaian Permasalahan} \times \text{skor tahapan}}{\sum \text{Rekomendasi Permasalahan KEK untuk diselesaikan stakeholder KEK}} \times 30\%$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya fasilitasi di Wilayah II telah difokuskan pada perencanaan pembangunan, pengelolaan dan penyelesaian isu-isu strategis. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar isu yang ada telah ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis. Berdasarkan hasil penghitungan indikator, tingkat capaian fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis di KEK Wilayah II tercatat sebesar 70%.

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Rapat Kerja Penyusunan Target Investasi dan Tenaga Kerja KEK	Terlaksana	<ol style="list-style-type: none"> Rapat Pembahasan potensi penambahan target investasi KEK Tahun 2025 telah dilakukan pada 8 Januari 2025 sebagai tindak lanjut inisiasi penetapan target. Telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional dan Evaluasi Kinerja KEK Tahun 2024 yang dihadiri oleh Dewan Kawasan, Administrator KEK, BUPP, dan LPEM UI.
2	Perencanaan pembangunan KEK Wilayah II	Terlaksana	<p>Rangkaian kegiatan perencanaan dilakukan melalui rapat pengembangan KEK Singhasari bersama LPDP serta pembahasan rencana usulan perluasan kawasan di KEK Gresik sebagai bagian dari persiapan pengelolaan KEK Wilayah II.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada tanggal 7 Mei 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Perluasan KEK Gresik Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penyiapan Kawasan Pabean KEK ETKI Banten
3	<i>Debottlenecking</i> isu strategis KEK	Terlaksana	<p>Sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk mendukung debottlenecking isu strategis KEK di Wilayah 2, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan Rapat Pembahasan Terkait Dukungan Impor dan Reekspor Logistik untuk Event GT World Challenge Asia 2025 di KEK Mandalika pada 16 April 2025 Telah dilakukan <i>Focus Group Discussion</i> Isu Lingkungan KEK dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai upaya fasilitasi isu lingkungan hidup di KEK Telah terlaksana Focus Group Discussion Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan Cukai pada KEK Gresik Telah dilakukan <i>Focus Group Discussion</i> terkait Status Terkini Kemajuan Pengembangan KEK Singhasari Telah dilakukan rapat koordinasi perkembangan KEK Palu, Sorong, dan Morotai sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap progres kawasan. Telah terlaksana Rapat Pembahasan Progress Perkembangan dan Isu dengan Administrator KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka mendukung penyempurnaan dan persiapan operasional pengelolaan KEK di Wilayah II. Kegiatan tersebut meliputi *Focus Group Discussion* Isu Lingkungan KEK dengan Kementerian Lingkungan Hidup

sebagai upaya fasilitasi isu lingkungan hidup di KEK, *Focus Group Discussion* terkait Status Terkini Kemajuan Pengembangan KEK Singhasari untuk pembahasan pengembangan Zona Pendidikan di kawasan tersebut. Selain itu, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pemberian Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai pada KEK Gresik sebagai bagian dari pengelolaan KEK Wilayah II. Dukungan teknis juga diberikan melalui rapat pembahasan dukungan Kementerian/Lembaga di KEK.

Rangkaian kegiatan lainnya termasuk telah terlaksana Rapat Pembahasan Progress Perkembangan dan Isu dengan Administrator KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali. Selain itu, dilaksanakan pembahasan untuk koordinasi perkembangan KEK Palu, Sorong, dan Morotai sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap progres kawasan. Seluruh kegiatan ini merupakan bagian dari strategi pengendalian untuk memperkuat kesiapan dan tata kelola kawasan secara menyeluruh.

Pelaksanaan rencana aksi selama Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan pemanfaatan anggaran yang cukup signifikan pada tahap awal pelaksanaan. Kegiatan rekomendasi pengendalian pembangunan KEK di Wilayah 2 hingga akhir Triwulan II mencapai sekitar 70,23% dari total anggaran kegiatan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan II, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Wilayah II pada Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus berjalan dengan lancar.

4

Sasaran Program : Terwujudnya Tata Kelola Biro Pengendalian KEK yang baik

Pencapaian Sasaran Program 4 : Terwujudnya Tata Kelola Biro Pengendalian KEK yang baik ditunjukkan oleh indikator kinerja yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian KEK. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian KEK

Latar Belakang

Pelaksanaan anggaran yang baik mencerminkan tidak hanya kemampuan biro dalam menyerap anggaran secara optimal, tetapi juga menunjukkan efektivitas biro dalam memadukan antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, tata kelola anggaran tidak terlepas dari sistem manajemen internal yang terpadu dan profesional. Hal ini mencakup perencanaan anggaran yang berbasis kinerja, mekanisme pelaporan dan evaluasi yang terintegrasi, serta pengawasan internal yang berjalan secara efektif. Selain itu, keberhasilan pengelolaan anggaran juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai, serta sistem administrasi dan prosedur kerja yang efisien dan selaras dengan kebijakan kelembagaan.

Kualitas pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan semata, melainkan juga dari kesesuaian antara alokasi dan output yang dihasilkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan biro dalam menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digitalisasi anggaran menjadi faktor-faktor penting yang harus terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola biro secara menyeluruh.

Indikator ini juga berperan sebagai cerminan kinerja biro dalam mendukung tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK secara umum, khususnya dalam menciptakan ekosistem kerja yang produktif, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran akan berdampak langsung pada kelancaran implementasi program-program strategis pengendalian KEK, sehingga mendukung tercapainya tujuan nasional dalam pengembangan kawasan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif.

Indikator kualitas pelaksanaan anggaran difokuskan pada penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran. Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 90%, mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2025 serta dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025, realisasi capaian telah mencapai 53,84%. Berikut hasil pengukuran kinerja dari indikator kualitas pelaksanaan anggaran Biro Pengendalian KEK:

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan II	Capaian Kinerja Triwulan II
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus	%	90 %	120%	120%

Persentase tata kelola yang baik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK merupakan indikator turunan langsung (cascading) dari indikator kinerja terkait tingkat realisasi anggaran. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan mencapai 90%. Berdasarkan data pada Triwulan II tahun 2025, kualitas pelaksanaan anggaran oleh Biro Pengendalian telah mencapai 120%. Nilai capaian diperoleh dari penghitungan dengan menggunakan formula berikut:

$$\begin{aligned} & \% \text{ Kualitas Pelaksanaan Anggaran} \\ & = (\text{Capaian realisasi anggaran} \times 50\%) + (\text{Capaian Output} \times 50\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Realisasi Anggaran} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Setelah Blokir}} \\ \text{Capaian Output} &= \text{Capaian Output sesuai Aplikasi SAKTI dan E-Monev} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\% \text{Kualitas Pelaksanaan Anggaran} \\
&= (\text{Capaian realisasi anggaran} \times 50\%) + (\text{Capaian Output} \times 50\%) \\
&= (1,346 \times 50\%) + (1 \times 50\%) \\
&= 67,3\% + 50\% \\
&= 117,3\%
\end{aligned}$$

$$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \frac{53.84\%}{40\%} = 1,346$$

$$\begin{aligned}
\text{Capaian Output} &= \text{Capaian Output sesuai Aplikasi SAKTI dan E-Monev} \\
&= 100\% : 100\% \\
&= 1
\end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran	Terlaksana	Biro Pengendalian telah melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan serta dasar pengelolaan anggaran Tahun 2025, yang disusun sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan ini dilakukan melalui rapat internal pembahasan program kerja dan anggaran yang diselenggarakan pada awal tahun anggaran 2025.
2	Mengidentifikasi capaian output	Terlaksana	Biro Pengendalian telah menyusun laporan realisasi anggaran sebagai wujud akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran, sekaligus menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain pelaksanaan rencana aksi utama, Biro Pengendalian KEK juga mengambil langkah-langkah pendukung untuk mendukung pencapaian target kinerja. Salah satunya adalah koordinasi internal terkait efisiensi dan penyesuaian alokasi anggaran agar tetap sejalan dengan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Penyesuaian juga dilakukan terhadap perencanaan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai respons atas kebijakan efisiensi, dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan menjaga pelaksanaan program tetap sesuai target.

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, kualitas pelaksanaan anggaran telah mencapai 120%. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang mendorong penajaman alokasi belanja pada kegiatan prioritas. Persentase realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah mulai dilaksanakan pada awal tahun, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan anggaran Biro Pengendalian KEK telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun terdapat penyesuaian yang berdampak pada tingkat optimalisasi beberapa kegiatan. Upaya efisiensi dalam penggunaan anggaran mengakibatkan sebagian program mengalami keterbatasan ruang gerak, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.

Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak terkait masih menghadapi tantangan, yang berdampak pada kelancaran proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di kawasan KEK. Hal ini turut memengaruhi realisasi capaian kinerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, Biro Pengendalian KEK berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan guna mencapai kualitas kinerja yang diinginkan. Langkah-langkah yang diambil melibatkan penyelenggaraan rapat kerja, penyusunan database monitoring, serta penerapan monitoring dan pelaporan berkala. Dengan upaya ini, diharapkan kinerja pelaksanaan anggaran Biro Pengendalian KEK dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, Juli 2025

Kepala Biro Pengendalian



Bambang Wijanarko